

ANALISIS TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN YANG DAPAT KERJASAMA DENGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN KARAWANG

Charles Bohlen Purba

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Email: bohlenpurba@yahoo.com)

Abstract: Less on developing and contributing fisheries sector on Gross National Product (GNP), especially capture fishing efforts in Karawang Regency, dominantly because of capital limitation and imprecisely capture fishing sector development. This research is trying to analyze financial feasibility of capture fishing sector and its relationship with financial institutions. The analyzing methods would be referred to Hanley and Spash (1993) there are Net Present Value (NPV), Net Benefit – Cost Ratio (B/C Ratio), Internal Rate of Return (IRR), Return of Investment (ROI), and Payback Period (PP). The results shows that capture fishing with drift gill net (JIH), sero and state gill net (JIT) and shell collecting are capture fisheries efforts with good financial conditions (NPV drift gill net/JIH= Rp.77.818.138, NPV Sero = Rp.83.894.081 dan NPV state gill net/JIT = Rp.91.005.295) and the other three capture fisheries efforts have NPV, B/C Ratio, IRR, ROI and PP appropriate with terms and conditions, then its could be more development and proper to get financial institutions support. And capture fisheries with fishhook and fishing line are not properly to be development. There are three potential financial institutions which could support the capture fisheries efforts, but for now on only KUD Mina Singa Perbangsa and BRI Bank which needed its 703.500.000 each year. And from BRI Bank Consist of general business credits usaha Pedesaan (KUPeDES), are optimally could be reaching Rp4.030.000.000, Rp 806.000.000 and Rp 120.900.000 each year. And there are financial institution which not needed its services because of the credits scale which offered are not suitable, the relations not connected, there are problems in collateral, and trust factor.

Keywords: Financial, Credits, Financial Institutions, Capture fishing efforts.

Abstrak: Kurang berkembangnya dan berkontribusinya Sektor Perikanan terhadap Gross National Product (GNP) khususnya Sektor Perikanan Tangkap di Kabupaten Karawang, sebahagian besar disebabkan oleh keterbatasan Modal dan kurang tepatnya Usaha Perikanan Tangkap dikembangkan. Penelitian ini mencoba menganalisis kelayakan finansial usaha perikanan tangkap dan kemitraan dengan Lembaga Keuangan. Metode Analisis mengacu kepada Hanley dan Spash (1993) meliputi Analisis Net Present Value (NPV), Net Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio), Interest Rate Of Return (IRR), Return of Investment (ROI) dan PayBack Period (PP). Hasil Analisis menunjukkan bahwa Usaha perikanan Jaring Insang Hanyut (JIH), Sero dan Jaring Insang Tetap (JIT) merupakan Usaha Perikanan Tangkap yang kondisi Finansialnya bagus (NPV Jaring Insang Hanyut /JIH = Rp. 77.818.138,- NPV Sero = Rp. 83.894.081,- dan NPV Jaring Insang Tetap/JIT = Rp.91.005.295,- dan ketiga Usaha Perikanan tangkap mempunyai NPV, B/C Ratio, IRR, ROI dan PP sesuai yang disyaratkan, sehingga dapat dikembangkan dan layak mendapatkan dukungan dari Lembaga Keuangan. Sedangkan Alat Tangkap Pukat Udang dan Pukat Pantai tidak

layak dikembangkan. Ada tiga lembaga keuangan yang potensial yang dapat mendukung usaha perikanan tersebut, namun untuk saat ini hanya KUD Mina Singa Perbangsa dan Bank BRI yang dibutuhkan perannya yaitu Rp.703.500.000.- tiap tahun dan dari Bank BRI terdiri dari Kredit Bisnis Umum, Kredit Usaha Pedesaan (KUPeDES) yang dapat dioptimalkan mencapai Rp.4.030.000.000.- Rp. 806.000.000.- dan Rp.120.900.000.- tiap tahun. Beberapa lembaga keuangan lainnya yang belum beroperasi disebabkan skala kredit yang ditanamkan tidak cocok, relasinya belum terbangun, masalah penjaminan serta faktor kepercayaan.

Kata kunci: Keuangan, Kredit, Lembaga Keuangan, Usaha Perikanan Tangkap.

PENDAHULUAN

Kegiatan perikanan di Indonesia, hingga saat ini masih didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), baik oleh nelayan, penangkap maupun nelayan pengolah hasil tangkapan. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari statistik perikanan tahun 2006 yang menunjukkan bahwa dari 412.497 unit armada perikanan yang digunakan oleh seluruh nelayan di Indonesia sekitar 90,9% merupakan Perahu Tanpa Motor, Perahu Motor Tempel dan Kapal Motor yang berukuran dibawah 5 GT. Hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia pada tahun 2006 mencapai hampir 49 juta unit. Dari angka tersebut hanya 13% saja yang mampu mengakses perbankan, sedangkan yang 87% mengandalkan modal sendiri. Bila melihat kontribusinya terhadap produk domestik bruto nasional (PDBN), maka sektor perikanan hanya menyumbangkan sekitar 4,04% atau Rp.71.9 triliun dari total Rp.1.778,7 triliun (BPS 2008), meskipun sektor ini mempunyai jangkauan usaha sangat luas dengan UKM yang paling banyak. Kurang berkembangnya sektor perikanan, khususnya usaha perikanan tangkap juga terlihat di pesisir utara kabupaten karawang. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi terletak pada keterbatasan modal menjalankan usaha. Hingga saat ini sedikit lembaga keuangan, baik milik pemerintah maupun swasta, dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya yang menjalin kerjasama dengan usaha nelayan ini. Hal ini karena usaha perikanan tangkap yang dilakukan nelayan kebanyakan tidak layak dikembangkan, sehingga dapat merugikan lembaga keuangan yang memberi kredit. Interaksi dan kerjasama usaha perikanan tangkap dengan lembaga keuangan belum harmonis dan belum dapat diandalkan untuk mengatasi permasalahan penyediaan modal usaha perikanan tangkap. Hal ini menyebabkan permasalahan turunan yaitu:

1. Pengelolaan usaha perikanan tangkap masih dilakukan secara tradisional dimana kondisi finansial usaha tidak jelas dan evaluasi sering dianggap tidak perlu. Kondisi ini juga semakin membingungkan bagi lembaga keuangan dan pemberi lainnya untuk menentukan mana usaha perikanan yang layak dan dapat didukung di dalam pendanaannya. Tidak adanya data evaluasi finansial ini menyebabkan lembaga keuangan menetapkan persyaratan kredit dan lainnya yang cukup ketat untuk ukuran pengelolaan yang tradisional tersebut.
2. Kalaupun dukungan pemodal ada pada beberapa usaha perikanan tangkap selama ini, terkadang juga kurang optimal baik dalam jumlah maupun pelayanan, sehingga produktivitas usaha menjadi terganggu. Dalam kaitan ini, maka optimalisasi dukungan dan peran perlu menjadi target bagi lembaga keuangan atau pemberi kredit lainnya

sehingga lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak.

3. Strategi kerjasama yang dibangun antara lembaga keuangan dengan usaha ekonomi kecil dan menengah terkadang kurang berjalan dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena strategi yang diterapkan kurang mengakomodir kepentingan semua komponen atau pihak terkait sehingga sering terjadi benturan dalam implementasinya.

Analisis Finansial Usaha Perikanan Tangkap Net Present Value(NPV). Net Present Value (NPV) digunakan untuk menilai manfaat investasi usaha perikanan tangkap yang merupakan jumlah nilai kini dari manfaat bersih dan dinyatakan dalam rupiah. Bila $NPV > 0$ berarti investasi menguntungkan, sedangkan bila $NPV < 0$ berarti investasi tidak menguntungkan atau usaha perikanan tangkap tersebut tidak layak dilaksanakan.

Benefit-Cost Ratio(B/C ratio). Benefit-Cost Ratio (B/C ratio) merupakan perbandingan antara total manfaat bersih investasi usaha perikanan tangkap yang bersifat positif, dengan total manfaat kotor investasi usaha perikanan tangkap yang bersifat negatif. Bila B/C ratio > 1 , maka investasi menguntungkan, sedangkan bila B/C ratio < 1 berarti investasi tersebut tidak layak, sehingga menjadi pertimbangan negatif bagi dukungan lembaga keuangan.

Internal Rate of Return (IRR). Internal Rate of Return (IRR) merupakan suku bunga maksimal untuk sampai kepada $NPV = 0$, jadi dalam keadaan batas untung rugi. Usaha perikanan tangkap dinyatakan "layak" bila $IRR >$ dari interest rate (suku bunga) yang berlaku. Bila IRR sama dengan interest rate yang berlaku maka nilai $NPV = 0$ (nol), dan jika $IRR <$ dari interest rate yang berlaku maka nilai $NPV < 0$ (nol), berarti usaha perikanan tangkap tersebut tidak layak dikembangkan.

Return of Investment(ROI). Return of Investment (ROI) digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi dari manfaat yang diterima pemilik. Usaha perikanan tangkap dinyatakan layak bila mempunyai $ROI > 1$, dan dinyatakan tidak layak bila mempunyai $ROI < 1$.

Payback Period(PP). Payback Period (PP) digunakan untuk mengetahui lamanya pengembalian investasi dari benefit (pendapatan) yang diterima pemilik.

Penetapan Jenis Usaha Perikanan Tangkap yang Layak Didukung Oleh Lembaga Keuangan. Jenis usaha perikanan tangkap di pesisir utara Kabupaten Karawang yang potensial mendapat dukungan dari lembaga keuangan didasarkan pada hasil analisis NPV, B/C ratio, IRR, ROI, dan PP. Bila usaha perikanan tangkap tersebut mempunyai $NPV > 0$, B/C ratio > 1 , IRR lebih besar dari interest rate (suku bunga) yang berlaku, dan $ROI > 1$, dan $PP < 1$, maka usaha perikanan tersebut layak dikembangkan dan didukung oleh lembaga keuangan. Interest rate(i) bank yang digunakan dalam analisis ini mengacu kepada Bank Indonesia (2009) yaitu 9,5 %.

Analisis Linier Goal Programming (LGP). Analisis linier goal programming(LGP) digunakan untuk mengoptimalkan peran kredit/ pembiayaan/jasa lembaga keuangan dalam mendukung usaha perikanan tangkap dinyatakan layak. Model linear goal programming untuk optimalisasi peran ini adalah:

Fungsi tujuan:

$$\begin{aligned}
 Z &= \sum_{i=1}^m (DB_i + DA_i) \\
 \text{Fungsi pembatas :} \\
 DB_1 - DA_1 & DB_2 - DA_2 \\
 &\dots \\
 &+ xa_1 + xa_2 \\
 &11 \quad 12 \\
 &+ xa_1 + a_{22}x \\
 &21 \\
 DB - DA + a_{m1}x_1 + a_{m2} \\
 &mm \\
 &+ xa_3 + \dots + xa_n = b_1 \\
 &13 \quad 1nn \\
 &+ xa_3 + \dots + a_{2n}x = b_2 \\
 &2 \quad 23 \quad n \\
 x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m
 \end{aligned}$$

Dimana: Z = total deviasi yang akan diminimumkan, DB_i = Deviasi bawah pembatas ke- i , DA_i = Deviasi atas pembatas ke- i , C_j = parameter fungsi tujuan ke- j , b_1 = kapasitas/ ketersediaan pembatas ke- i , a_{ij} = parameter fungsi pembatas ke- i pada variabel keputusan ke- j , pembatas ke- i = jenis kredit/ pembiaya-an/jasa i dari lembaga keuangan, X_j = variabel putusan ke- j (jumlah dan jenis lembaga keuangan), X_j , DA_i dan $DB_i > 0$, untuk $i = 1, 2, \dots, m$ dan $j = 1, 2, \dots, n$.

Hasil Analisis Pembiayaan dan Manfaat Usaha Perikanan Tangkap. Kabupaten Karawang merupakan basis usaha perikanan tangkap yang sangat diperhitungkan di pesisir utara Jawa Barat. Adapun jenis usaha perikanan tangkap yang cukup diperhitungkan dan diusahakan signifikan di Kabupaten Karawang adalah usaha perikanan Bubu, Jaring Insang Hanyut (JIH), Sero dan jaring insang Tetap (JIT), merupakan usaha perikanan tangkap yang dominan dan diusahakan dalam skala besar oleh nelayan di Kabupaten Karawang. Bubu merupakan usaha perikanan tangkap skala kecil, namun banyak digemari oleh remaja dan ibu-ibu sehingga penopang ekonomi keluarga. Hasil analisis finansial terkait pembiayaan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang disajikan pada Tabel 1.

Untuk usaha perikanan Sero, Jaring Insang Hanyut (JIH) dan Jaring Insang Tetap (JIT), modal awal tersebut termasuk besar dan banyak digunakan untuk pengadaan armada, karena armada yang disiapkan cukup besar dan diharapkan dapat menjangkau perairan luas dengan waktu operasi 1 - 3 bulan per tripnya. Namun secara umum, pembiayaan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jaring Insang Tetap (JIT) merupakan usaha perikanan tangkap yang paling signifikan mengalami penurunan pembiayaan selama tahun/waktu pengoperasiannya. Sedangkan usaha pancing lainnya mengalami penurunan paling kecil. Perilaku penurunan ini sangat dipengaruhi oleh intensitas perawatan selama waktu pengoperasian.

Tabel 1. Kondisi Pembiayaan (*Cost*) Usaha perikanan tangkap di kabupaten Karawang

Akhir Tahun	Biaya (Rp)						
	Pukat Udang	Bubu	Pukat Pantai	JIH	JIL	Sero	JIT
0	30,200,000	5,418,519	10,772,093	186,093,750	125,865,385	63,825,000	244,760,870
1	28,042,857	3,096,296	7,181,395	155,078,125	102,980,769	49,641,667	190,369,565
2	10,785,714	2,322,222	6,283,721	77,539,063	80,096,154	42,550,000	163,173,913
3	6,471,429	1,161,111	4,488,372	46,523,438	57,211,538	35,458,333	108,782,609
4	4,314,286	774,074	3,590,698	31,015,625	45,769,231	14,183,333	81,586,957
5	2,157,143	387,037	2,693,023	15,507,813	34,326,923	7,091,667	54,391,304

Sumber: Hasil analisis data lapangan (2009)

Hasil analisis finansial terhadap manfaat (benefit) tujuh usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang pada Tabel 2 menunjukkan bahwa usaha perikanan Jaring Insang Tetap (JIT) merupakan usaha dengan manfaat terbesar di Kabupaten Karawang. Selain besar, manfaat usaha perikanan jaring insang tetap (JIT) tersebut juga cenderung meningkat terus dari tahun ke tahun. Dari tujuh usaha perikanan tersebut, hanya usaha Sero yang pernah mengalami penurunan dalam penerimaan manfaat. Meskipun pernah menurun, manfaat dari usaha perikanan tersebut sangat fantastis dibandingkan jaring insang hanyut (JIH) dan Sero serta Bubu.

Hasil Analisis Kelayakan Finansial Usaha Perikanan Tangkap. Hasil analisis finansial lanjutan menggunakan parameter NPV, B/C ratio, IRR, ROI, dan PP untuk setiap usaha perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Karawang ditunjukkan oleh Tabel 2. Berdasarkan hasil analisis Tabel 2, terlihat bahwa Pukat Udang dan Pukat Pantai serta JIL mempunyai NPV yang negatif yaitu masing-masing – Rp 1.602.861 dan – Rp 314.653 serta –Rp 1.725.476. Nilai NPV tersebut memberi indikasi bahwa jika ketiga usaha perikanan tangkap ini dilakukan, maka menyebabkan penerimaan bersih yang diterima nelayan (NPV), yang diterima nelayan Pukat Udang pada suku bunga berlaku (9,5 %) selama waktu pengoperasian 5 tahun adalah berupa kerugian sebesar Rp 1.602.861, dan yang diterima nelayan Pukat pantai pada suku bunga berlaku (9,5 %) selama waktu pengoperasian 5 tahun adalah berupa kerugian sebesar Rp 314.653, serta JIL sebesar Rp1.725.476.

Untuk parameter NPV ini, usaha perikanan Bubu, jaring insang Hanyut (JIH), Sero jaring insang tetap (JIT), mempunyai NPV yang positif (> 0 (nol)). Nilai NPV usaha perikanan, jaring insang hanyut (JIH), Sero dan jaring insang tetap (JIT) paling besar, yang berarti ketiga usaha perikanan tangkap tersebut memberikan keuntungan cukup menjanjikan selama waktu pengoperasiannya. Hasil analisis parameter B/C ratio menunjukkan bahwa usaha perikanan JIH, Sero dan Jaring insang Tetap (JIT) mempunyai B/C ratio yang besar. Terkait dengan ini, maka dapat dikatakan bahwa ketiga usaha perikanan ini memberikan manfaat besar, yaitu masing-masing 1,38, 1,65, dan 1,30 kali lebih besar dari pada jumlah pembiayaan yang dikeluarkan selama waktu pengoperasian usaha tersebut.

Tabel 2. Kondisi manfaat (*benefit*) usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang

Akhir Tahun	<i>Benefit</i> (Rp)						
	Pukat Udang	Bubu	Pukat Pantai	JIH	JIL	Sero	JIT
0	-	-	-	-	-	-	-
1	11,142,857	2,796,296	7,238,372	135,562,500	97,589,744	73,500,000	141,217,391
2	15,952,381	3,283,951	7,697,674	102,250,000	83,884,615	68,416,667	175,043,478
3	21,714,286	3,419,753	7,058,140	153,953,125	99,794,872	69,333,333	249,782,609
4	27,000,000	4,030,864	8,302,326	161,328,125	107,000,000	68,833,333	261,521,739
5	21,571,429	3,870,370	8,976,744	155,078,125	114,423,077	70,916,667	271,956,522

Sumber: Hasil analisis data lapangan (2009)

Tabel 3. Kondisi finansial usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang

Jenis Usaha Perikanan Tangkap	Parameter Finansial					
	NPVi	B/C	IRR	ROI	PP	
Pukat Udang	Rp (1,602,861)	1.19	8.38%	3.22	0.31	
Bubu bubu	Rp 1,307,953	1.32	15.69%	3.21	0.31	
Pukat Pantai	Rp (314,653)	1.12	8.68%	3.65	0.27	
JIH	Rp 77,818,138	1.38	19.34%	3.81	0.26	
JIL	Rp (1,725,476)	1.13	9.14%	3.99	0.25	
Sero	Rp 83,894,081	1.65	43.66%	5.50	0.18	
JIT	Rp 91,005,295	1.30	17.55%	4.49	0.22	

Sumber: Hasil analisis data lapangan (2009)

Usaha perikanan JIH, Sero, jaring insang tetap (JIT), termasuk usaha perikanan tangkap dengan nilai IRR besar di Kabupaten Karawang yaitu masing-masing 19,34%, 43,66%, 17,55%, dan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa menginvestasikan uang pada usaha perikanan JIH, Sero, jaring insang tetap (JIT), akan mendatangkan keuntungan yang relatif besar yang lebih tinggi dari pada disimpan di bank (suku bunga hanya 9,5 % per tahun), yaitu masing-masing 19,34 %, 43,66 %, 17,55 % per tahunnya. Sedangkan untuk usaha perikanan Pukat udang, Pukat Pantai, dan JIL hasil analisis menunjukkan hanya mendatangkan keuntungan masing-masing 8,38% dan 8,68 %, dan 9,14% dan nilai ini lebih rendah dari suku bunga yang berlaku, sehingga investasi di bank sebaiknya lebih dipilih daripada menjalankan ketiga usaha perikanan tangkap tersebut.

Hasil analisis parameter ROI menunjukkan bahwa usaha perikanan JIH, Sero, dan jaring insang tetap (JIT), termasuk usaha perikanan tangkap dengan pengembalian investasi yang tinggi. Usaha perikanan Sero paling tinggi ROI-nya yang menunjukkan bahwa usaha ini dapat mengembalikan investasi sebesar 5,50 kali dari investasi yang ditanam. Oleh karena kondisi ini, maka hasil analisis terhadap parameter PP menunjukkan

bahwa usaha sero juga mempunyai perputaran usaha paling cepat/singkat yaitu hanya 0,18.

Lembaga Keuangan Potensial dan Jenis Kreditnya. Hasil survei lapangan menunjukkan paling tidak ada dua lembaga keuangan yang dapat dijadikan mitra kerja usaha perikanan tangkap terpilih di Kabupaten Karawang, yaitu KUD Mina Singa Perbangsa dan Bank BRI. Pada KUD Mina Singa Perbangsa kredit yang umum disediakan terdiri dari kredit kelompok utama dengan nilai sekitar Rp. 25.000.000 - Rp 50.000.000, Kredit Mikro dengan nilai berkisar Rp 3.000.000. Kredit yang diberikan oleh BRI ada tiga jenis, yaitu kredit bisnis umum, kredit Agri Bisnis dan Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES). Kredit Bisnis Umum biasanya maksimum Rp 200.000.000 dan kredit Agri Bisnis maksimum yang disetujui Rp. 125.000.000 dan kredit usaha pedesaan Rp. 100.000.000.

Hasil Optimalisasi Kredit/Pembiayaan/Jasa Pada Usaha Perikanan Tangkap. Hasil analisis *linear goal programming* :

LINDO/PC (9 AUG 89)

COPYRIGHT (C) 1989 LINDO SYSTEMS, INC. PORTIONS

COPYRIGHT (C) 1981 MICROSOFT CORPORATION. LICENSED

MATERIAL, ALL RIGHTS RESERVED. COPYING EXCEPT AS

AUTHORIZED IN LICENSE AGREEMENT IS PROHIBITED.

ANNUAL DIST. LICENSE UNE-2271 NOT FOR USE AFTER 28 FEB. 1991

FOR DEPT. OF AGRI. ECO.& BUS. MGMT, UNIVERSITY OF NEW ENGLAND

: min DB1 + DB2 + DB3 + DB4 + DA5

? st

? DB1 + 100X3 >= 4030

? DB2 + 25X1 + 50X2 + 20X3 >= 960

? DB3 + 5X1 + 3X2 + 3X3 + 3X4 >= 607.5

? DB4 + 3X2 >= 703.5

? DA5 + 0.1X1 + 0.03X2 + 0.065X3 + 0.075X4 <= 53.25

? end

: go

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 4

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) .000000000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
DB1	.000000	1.000000
DB2	.000000	1.000000
DB3	.000000	1.000000
DB4	.000000	1.000000
DA5	.000000	1.000000
X3	40.300000	.000000
X1	.000000	.000000
X2	234.500000	.000000

X4 .000000 .000000

ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES

2) .000000 .000000
 3) 11571.000000 .000000
 4) 216.900000 .000000
 5) .000000 .000000
 6) 43.595500 .000000

NO. ITERATIONS= 4

DO RANGE(SENSITIVITY) ANALYSIS?

? yes

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES			
VARIABLE	CURRENT COEF	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
DB1	1.000000	INFINITY	1.000000
DB2	1.000000	INFINITY	1.000000
DB3	1.000000	INFINITY	1.000000
DB4	1.000000	INFINITY	1.000000
DA5	1.000000	INFINITY	1.000000
X3	.000000	100.000000	.000000
X1	.000000	INFINITY	.000000
X2	.000000	3.000000	.000000
X4	.000000	INFINITY	.000000

RIGHTHAND SIDE RANGES			
ROW	CURRENT RHS	ALLOWABLE INCREASE	ALLOWABLE DECREASE
2	4030.000000	67070.000000	4030.000000
3	960.000000	11571.000000	INFINITY
4	607.500000	216.900000	INFINITY
5	703.500000	4359.550000	216.900000
6	53.250000	INFINITY	43.595500

Perhitungan:

Berdasarkan hasil analisis *linear goal programming* (LGP), terlihat paket kredit Bank Jabar-Banten (X1), paket kredit KUD Mina Singaperbangsa (X2), paket kredit Bank Rakyat Indonesia (X3), paket kredit Bank Perkreditan Rakyat (X4) dalam mendukung pembiayaan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang berturut-turut 0,00, 234,5, 40,30, dan 0,00. Bila nilai tersebut dikonversikan kepada nilai kredit sebenarnya, maka untuk KUD Mina Singaperbangsa, nilai kredit/pembiayaan/jasa yang ditawarkan bagi usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang dapat dioptimalkan:

a. Kategori kredit usaha mikro utama (K2) (Rp. 000.000)

$$= 50 \times 234,5$$

$$= 11725$$

b. Kategori kredit usaha mikro kecil (K4) (Rp. 000.000)

$$= 3 \times 234,5$$

$$= 703,5$$

c. Kategori pembinaan usaha (Rp. 000.000)

$$= 3 \times 234,5$$

$$= 703,5$$

Nilai kredit/pembiayaan/jasa yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (X3) bagi usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang dapat dioptimalkan:

a. Kategori kredit usaha menengah dan besar (K1) (Rp. 000.000)

$$= 100 \times 40,30$$

$$= 4030$$

b. Kategori kredit usaha mikro utama (K2) (Rp. 000.000)

$$= 20 \times 40,30$$

$$= 806$$

c. Kategori kredit usaha mikro kecil (K4) (Rp. 000.000)

$$= 3 \times 40,30$$

$$= 120,9$$

Peran Bank Jabar-Banten dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dianggap tidak begitu diperlukan saat ini untuk mendukung pembiayaan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang. Hal ini ditunjukkan oleh paket kredit kedua lembaga keuangan tersebut yang masing-masing bernilai 0,00.

Lembaga keuangan yang diharapkan perannya untuk mendukung pembiayaan usaha perikanan bubu, jaring insang hanyut (JIH), sero, dan jaring insang tetap (JIT) di Kabupaten Karawang adalah KUD Mina Singaperbangsa dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank Jabar-Banten dan Bank Perkreditan Rakyat belum terlalu dibutuhkan perannya. Kondisi ini lebih disebabkan oleh aktivitas usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang yang berada di pesisir pantai yang jauh dari keramaian sehingga hanya lembaga keuangan tertentu yang mau berkorban dan sedikit peduli yang bisa bertahan. Pada Tabel 4 disajikan tentang pola optimalisasi peran yang dapat dilakukan oleh KUD Mina Singaperbangsa dan Bank Rakyat Indonesia tersebut untuk usaha perikanan tangkap Kabupaten Karawang melalui tawaran pelayanan beberapa jenis kredit/pembiayaan/jasa lainnya.

Pada Tabel 4 ditunjukkan pola optimalisasi peran KUD Mina Singaperbangsa dalam pembiayaan usaha perikanan tangkap yang layak dikembangkan di Kabupaten Karawang berupa pemberian kredit yang diikuti dengan pembinaan usaha perikanan tangkap. Adapun jenis kredit yang diberikan dan dibutuhkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang adalah Kredit Kelompok Utama (kategori kredit K2) dan Kredit Mikro (kategori kredit K4). Kredit Kelompok Utama merupakan kredit yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap di lokasi, disamping karena jumlahnya cukup besar juga karena di lokasi memang belum ada lembaga keuangan yang mampu memberikan kredit cukup besar. Terkait dengan ini, maka KUD Mina Singaperbangsa menjadi satu-satunya tumpuan dan harapan nelayan terutama pada saat membutuhkan biaya besar seperti pengadaan saran penangkapan ikan yang baru dan talangan biaya perbekalan (terutama usaha perikanan JIH dan JIT). Selama ini memang baru sebagian dari nelayan yang dapat memanfaatkan kredit tersebut, karena terbatasnya dana koperasi.

Tabel 4. Pola optimalisasi kredit/pembiayaan/jasa dari lembaga keuangan pada usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang

No.	Jenis Lembaga Keuangan	Nama Kredit/ Pembiayaan/Jasa	Alokasi Optimal Kredit/ Pembiayaan/Jasa	Usaha Perikanan Tangkap Sasaran
1.	KUD Mina Singaperbangsa	Kredit Kelompok Utama	Rp 11.725.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Bubu • Jaring Insang Hanyut (JIH) • Sero • Jaring Insang Tetap (JIT)
		Kredit Mikro	Rp 703.500.000	
		Pembinaan Usaha	Rp 703.500.000	
2.	Bank Rakyat Indonesia	Kredit Bisnis Umum	Rp 4.030.000.000	
		Kredit Agribisnis	Rp 806.000.000	
		Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES)	Rp 120.900.000	

Sumber: Hasil Analisis : Data Lapangan (2009)

Melihat kondisi ini, maka peran KUD Mina Singaperbangsa untuk selalu menyiapkan kredit menengah tersebut bagi kelangsungan usaha perikanan tangkap yang skala pengusahaannya cukup besar menjadi mutlak diperlukan. Dalam kaitan ini, maka alokasi Kredit Kelompok Utama ini yang saat ini hanya sekitar Rp 3.500.000.000 perlu ditingkatkan sehingga menjadi Rp 11.725.000.000 per tahun. Dalam pemenuhan anggaran kredit tersebut, KUD Mina Singaperbangsa dapat bekerjasama dengan perbankan atau investor lainnya.

Berdasarkan Tabel 4, alokasi Kredit Mikro dari KUD Mina Singaperbangsa perlu ditingkatkan sehingga menjadi Rp 703.500.000 per tahun. Hal ini wajar karena tidak hanya usaha perikanan tangkap skala besar yang tidak kebagian, tetapi usaha perikanan tangkap yang memanfaatkan kredit Rp 3.000.000 – Rp 3.500.000 juga sering tidak mendapatkannya. Hal ini menjadi perlu diperhatikan karena pendanaan dari perbankan sangat sulit disamping persyaratannya yang rumit juga karena letaknya yang jauh.

KUD Singaperbangsa juga dapat mengoptimalkan perannya dalam memberikan pembinaan kepada nelayan, pedagang/pengolah ikan anggota KUD. Alokasi anggaran pembinaan ini dapat dioptimalkan menjadi 703.500.000 per tahun. Alokasi tersebut memang cukup besar, tetapi pembinaan yang dilakukan terus-menerus melalui pelatihan /workshop, atau diskusi lainnya sangat membantu meningkatkan kinerja nelayan yang berimbas pada peningkatan keuntungan bagi nelayan dan KUD.

Bank Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya perbankan yang bersedia memberikan kredit kepada pelaku usaha perikanan tangkap di pesisir utara Kabupaten Karawang ini. Pada kenyataannya, jenis kredit dan nilai kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia belum mempunyai pengaruh yang cukup signifikan untuk membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh nelayan di lokasi. Selama ini di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan, Kredit Bisnis Umum, Kredit Modal Kerja (KMK), dan Kredit Usaha

Pedesaan (KUPeDES) baru dimanfaatkan masing-masing sekitar Rp 2.200.000.00, Rp 240.000.000, dan Rp 93.000.000 dalam setahun. Bank Rakyat Indonesia sangat selektif dan berhati-hati dalam memberikan kredit-kredit tersebut. Hal ini dapat dipahami karena pertimbangan risiko dan sulitnya medan bila terjadi kredit macet di kemudian hari. Akibat dari kondisi ini, KUD Mina Singaperbangsa yang berada langsung di lokasi sering menjadi sasaran ketidakpuasan dan cemoohan nelayan dan lainnya yang membutuhkan dana talangan.

Terlepas dari itu, seiring dengan perbaikan sistem kredit dan dukungan dari pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Daerah, peran Bank Rakyat Indonesia masih dapat ditingkatkan hingga alokasi kreditnya menjadi optimal, yaitu untuk Kredit Bisnis Umum, Kredit Modal Kerja (KMK), dan Kredit Usaha Pedesaan (KUPeDES) dapat ditingkatkan masing-masing Rp 4.030.000.000, Rp 806.000.000, dan Rp 120.900.000. Alokasi Kredit Bisnis Umum lebih tinggi daripada kredit lainnya, karena usaha perikanan tangkap yang termasuk layak dan nantinya banyak membutuhkan bantuan pembiayaan di Kabupaten Karawang umumnya berskala cukup besar seperti usaha perikanan JIH dan JIT. Kredit Mikro Kecil dapat dimanfaatkan oleh usaha perikanan tangkap bubu atau usaha kecil lainnya yang memiliki prospek di lokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan ketujuh usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang yang cenderung menurun setiap tahunnya memberi indikasi bahwa tidak banyak kerusakan atau permasalahan serius yang terjadi pada usaha perikanan tangkap setelah dilakukan investasi di tahun pertama. Hal ini bisa disebabkan oleh kecenderungan nelayan khususnya yang berskala besar yang lebih memiliki peralatan penangkapan kuat dan berkualitas tinggi, walaupun dengan investasi relatif mahal.

Kondisi ini bisa terlihat dari pembiayaan awal (investasi) usaha perikanan Bubu, JIH, Sero dan Jaring Insang Tetap (JIT), yang sangat besar masing-masing mencapai nilai Rp 5.418.519, Rp 186.093.750, Rp 63.825.000 dan Rp. 244.760.870. pembiayaan yang besar dari nelayan tersebut juga berdampak cukup positif pada manfaat (benefit) yang diberikan. Nelayan-nelayan dari usaha perikanan JIH, Sero, JIT mendapatkan keuntungan cukup besar (NPV JIH= Rp.77.818.138, NPV Sero =Rp 88.894.081 , NPV JIT = Rp. 91.005.295.) meskipun tidak selalu meningkat. Selama ini nelayan dapat menjangkau perairan yang luas dalam melakukan penangkapan, dan dapat berhari-hari di laut karena armada penangkapan yang dimiliki memadai. Usaha pukat udang dan pukat pantai serta JIL mempunyai nilai NPV, B/C ratio, dan IRR yang tidak standar, sehingga bila dilakukan dapat merugi. Parameter finansial ini perlu menjadi perhatian, supaya nelayan tidak terjebak pada usaha-usaha perikanan tangkap yang justru mempersulit nelayan dan menjadi masalah sosial di lokasi. Terkait dengan ini, maka dari tujuh jenis usaha perikanan tangkap yang banyak diusahakan nelayan di Kabupaten Karawang tersebut hanya ada tiga yang dapat dilanjutkan dan layak didukung oleh lembaga keuangan, yaitu Usaha Perikanan JIH, Sero, usaha perikanan Jaring Insang Tetap (JIT). Adanya lembaga keuangan yang tidak dibutuhkan perannya dengan berbagai jenis kredit/ jasa/ pembiayaannya dapat disebabkan oleh skala kredit yang ditawarkan tidak cocok bagi nelayan, relasinya belum terbangun, masalah penjaminan serta faktor kepercayaan.

Untuk masalah penjaminan, memang hampir semua lembaga keuangan

mempermasalahkan lemahnya kemampuan nelayan dan masyarakat pesisir dalam penyediaan jaminan yang dibutuhkan. Lembaga keuangan, umumnya mengharapkan jaminan berupa sertifikat tanah, rumah, gedung, dan lainnya yang tidak bergerak, sedangkan nelayan umumnya mempunyai perahu yang sifatnya bergerak sehingga berpeluang untuk hilang atau tenggelam. Beberapa nelayan yang memiliki rumah atau tanah, umumnya tidak punya sertifikat atau lainnya. Mereka kesulitan dalam mengurus surat-surat tersebut karena birokrasi yang berbelit-belit dan biaya perijinan yang mahal. Faktor kepercayaan juga merupakan hal penting yang menjadi pertimbangan lembaga keuangan. Beberapa nelayan ada yang berasal dari luar Kabupaten Karawang sehingga sangat sulit menjalin komitmen dengan mereka. Disamping itu, beberapa nelayan yang sudah berkomitmen dengan lembaga keuangan, juga terkadang tidak ditepati bila mereka sedang kepepet sehingga justru membuat konflik dengan lembaga keuangan. Adapun lembaga keuangan yang menjalin kerjasama dengan nelayan di Kabupaten Karawang selama ini diantaranya KUD Mina Singa Perbangsa dan BRI. Selain KUD Mina Singa dan Perbangsa dan BRI, kredit dari dua lembaga keuangan lainnya (BPR dan Bank Jabar Banten) sangat terbatas dan belum terlihat dikembangkan lebih lanjut. KUD Mina Singa Perbangsa dan BRI memang jadi satu-satunya lembaga keuangan yang intensif membantu nelayan. Terhadap kondisi tersebut memang diperlukan kesadaran dan pengertian dari semua pihak terutama kalangan nelayan dan aparat Pemerintah daerah sehingga lembaga keuangan merasa aman dan dalam memberikan kredit dan nelayan dapat memanfaatkan kredit yang ada.

PENUTUP

Pembiayaan ketujuh usaha perikanan tangkap di Kabupaten Karawang yang cenderung menurun setiap tahunnya. Usaha perikanan JIH, Sero dan jaring insang tetap (JIT) merupakan usaha perikanan tangkap yang pantas dikembangkan dan menjanjikan (NPV JIH = Rp 77.818.138, NPV Sero 88.894.081, NPV JIT = Rp 91.005.295). tiga dari tujuh usaha perikanan tangkap yang banyak diusahakan oleh nelayan di Kabupaten Karawang, yaitu usaha perikanan JIH, Sero, usaha perikanan jaring insang tetap (JIT), mempunyai NPV, B/C ratio, IRR, ROI, dan PP sesuai yang dipersyaratkan. Terkait dengan ini, maka ketiga usaha perikanan tangkap tersebut layak didukung pengembangannya. KUD Mina Singa Perbangsa dan BRI serta BPR dan Bank Jabar Banten merupakan lembaga keuangan yang potensial mendukung usaha perikanan tangkap di lokasi tersebut. Namun untuk saat ini, hanya KUD Mina Singa Perbangsa dan BRI yang dibutuhkan perannya dengan lima jenis kredit/ pembiayaan/jasa yang dapat dioptimalkan alokasinya.

Alokasi optimal Kredit kelompok utama dan kredit mikro Pembinaan Usaha pada KUD Mina Singa Perbangsa masing-masing mencapai Rp 11.725.000.000 dan Rp 703.500.000 per tahun. Alokasi optimal bisnis umum, kredit Agri Bisnis dan kredit usaha pedesaan (KUPeDES) masing-masing mencapai Rp 4.030.000.000, Rp 806.000.000 dan Rp 120.900.000 per tahun.

Adanya lembaga keuangan yang tidak dibutuhkan perannya dengan berbagai jenis kredit/ jasa/pembiayaannya dapat disebabkan oleh skala kredit yang ditawarkan tidak cocok bagi nelayan, relasinya belum terbangun, masalah penjaminan serta faktor kepercayaan.

Akses pemodalan bagi usaha perikanan tangkap yang termasuk kategori layak dikembangkan, perlu dipermudah dalam bentuk mendapatkan modal dari perbankan

dengan mempermudah perijinan maupun jalur birokrasi, serta aparat PEMDA perlu membantu penjaminan yang dibutuhkan oleh lembaga ke-uangan/perbankan terutama bagi nelayan yang kurang mampu.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik, (2008). Data Statistik Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Jakrta.
- Depkominfo, (2007). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), <http://www.depkominfo.go.id/>, diakses tanggal 5 Februari 2007.
- Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), (2004). Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2001-2004, DKP, Jakarta.
- Imron, M, (2008). Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Demersal Yang Berkelanjutan di Perairan Tegal, Jawa Tengah *Disertasi* Sekolah Pascasarjana, IPB. Bogor, 2008.
- Kimker, A. L, (1994). Tunner Crab Survival in Closed Pots, *Alaska Fishery Research Bulletin*, Vol 1 (2) pp 179 – 183, 1994.
- Pearce, D. dan D. Moran, (199). The Economic Value of Biodiversity, IUCN – The World Conservation Union, London.
- Pearce dan Robinson, (1997). Manajemen Strategik, Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, Jilid Satu, Alih Bahasa Terbitan Pertama Bina Aksara, Jakarta.
- PMB, (2004). Swamitra Mina Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Masyarakat Pesisir, <http://www.dkp.go.id/>, diakses tanggal 5 Desember 2004.
- Suman, A., Rijal, M., dan Subani, W, (1993). Status Perikanan Udang Karang di Perairan Pangandaran, *Jurnal Penelitian Perikanan Laut* , 81 : 1 -7, 1993
- Supranto J. M. A, (1991). Metode Riset. Aplikasinya Dalam Pemasaran, Jakarta: Penerbit PT. RINEKA CIPTA.
- Tjiptono, F, (1995). Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Nurani, T.W. dan Wisudo, (2007). Kajian Tekno-Ekonomi Usaha Perikanan Longline untuk Fresh dan Frozen Tuna Sashimi, *Buletin PSP* Vol. VI. 1: 1-1

